

V I S I

Program Magister Kebijakan Publik yang berdaya saing professional, inovatif dalam bidang kebijakan publik berbasis budaya dan berwawasan lingkungan tahun 2026.

M I S I

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu Kebijakan Publik berorientasi akademik dan profesi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan kajian ilmiah di bidang ilmu Kebijakan Publik.
3. Menjalin kerjasama kemitraan dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil pengembangan, pengetahuan dalam pembangunan.

TUJUAN

1. Meningkatkan kontribusi dalam mencetak lulusan berciri akademis yang dapat menguasai berbagai berbagai matra ilmu Kebijakan Publik secara konseptual dan teoritis.
2. Meningkatkan kontribusi dalam mencetak lulusan dengan keahlian profesional yang handal memanfaatkan instrumen Kebijakan Publik di berbagai pemecahan masalah publik.
3. Dihasilkannya karya akademik melalui berbagai kegiatan penelitian dasar, terapan, dan kajian akademik lainnya di bidang ilmu Kebijakan Publik dalam upaya mewujudkan kinerja ilmuwan membangun.
4. Menyebarnya secara meluas karya-karya akademik dan profesi di bidang ilmu Kebijakan Publik melalui jurnal ilmiah, *policy papers*, artikel, forum diskusi/seminar, dan media lainnya.
5. Berkembangnya jalinan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil) dalam memajukan Program Magister Kebijakan Publik.

Kualifikasi dan Persyaratan Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa dapat berasal dari pegawai pemerintah, pegawai non pemerintah, aktivis LSM, peneliti, dosen, pelaku bisnis dan lulusan S1 yang mempunyai minat pada Kebijakan Publik, dengan syarat-syarat, sebagai berikut :

- ✓ **Akademik :**
 1. Memiliki Ijazah Sarjana (S1) semua bidang ilmu dari PTN, PTS yang telah di akreditasi oleh Kemdiknas, atau dari PT di luar negeri yang ijazahnya telah disetarakan oleh Kemdiknas
 2. Indeks Prestasi Kumulatif Min. 3,00
 3. Lulus dalam ujian seleksi (TPA, TOEFL tertulis dan wawancara)
 4. TOEFL dan TPA dengan nilai minimal 400 menjadi syarat untuk mengikuti Ujian Tesis
- ✓ **Administratif :**
 1. Permohonan pendaftaran (Form disediakan)
 2. Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai S1
 3. Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai SMA/SMK
 4. Rekomendasi 2 orang yang berkualifikasi minimal S2
 5. Berbadan sehat (dinyatakan dengan surat keterangan dokter)
 6. Riwayat Hidup
 7. Surat Izin atasan dan/atau persetujuan Tugas Belajar dari Instansi tempat bekerja (PNS, Karyawan Swasta dan (LSM))
 8. Foto ukuran 3x4cm 2 lembar
 9. KTP dan Kartu Keluarga 1 lembar
 10. KTP dan Kartu Keluarga Orang Tua 1 lembar

Fasilitas Pendukung

- ✓ Ruang Kelas
- ✓ Media Pembelajaran
- ✓ Perpustakaan
- ✓ Jurnal / Karya Tulis Ilmiah
- ✓ Unit Pengkajian

➤ M A T R I K U L A S I (Non-SKS)

1. Kebijakan Publik
2. Metode Penelitian

➤ W A J I B

1. Filsafat Ilmu (2 SKS)
2. Teori, Analisis, dan Proses Kebijakan Publik (3 SKS)
3. Formulasi dan Proses Kebijakan Publik (3 SKS)
4. Implementasi Kebijakan Publik (3 SKS)
5. Evaluasi dan *Assesment* Kebijakan Publik (2 SKS)
6. Demokrasi dan Etika Jabatan Publik (2 SKS)
7. Kebijakan Publik, Kebudayaan, dan Lingkungan (2 SKS)
8. Metode Penelitian Kebijakan (3 SKS)
9. Publikasi Ilmiah (1 SKS)
10. Banchmarking (1 SKS)
11. Tesis (6 SKS)

➤ Konsentrasi Pembangunan Daerah & Otonomi Daerah

1. Hukum dan Manajemen Pemerintah Daerah (3 SKS)
2. Perencanaan Pembangunan Daerah (3 SKS)
3. Sistem Pemerintahan Lokal (3 SK S)
4. Kepemimpinan dan Koordinasi Pemerintahan (3 SKS)
5. Seminar Kebijakan Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (2 SKS)

➤ Konsentrasi Kependudukan, Ketenagakerjaan & Gender

1. Ketenagakerjaan dan Gender (3 SKS)
2. Mobilitas Penduduk dan Perubahan Sosial (3 SKS)
3. Urban, Rural dan Kebijakan Publik (3 SKS)
4. Manajemen Sumberdaya Manusia (3 SKS)
5. Seminar Kebijakan Kependudukan & Ketenagakerjaan (2 SKS)

➤ Konsentrasi Tata Kelola Pemilu

1. Pencegahan dan Penanganan Konflik (3 SKS)
2. Manajemen Logistik Pemilu (3 SKS)
3. Regulasi dan Birokrasi Pemilu (3 SKS)
4. Electoral Malpractice dan Asesmen Kualitas Pemilu (3 SKS)
5. Seminar Tata Kelola Pemilu (2 SKS)



Tenaga Pendidik (Dosen Pengajar)

Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, MS
 Prof. Dr. Drs. Agustinus Fatem, MT
 Prof. Dr. Yohanis Rante, SE., M.Si
 Prof. Dr. Partino, M.Pd
 Prof. Dr. Dirk Veplun, MS
 Prof. Dr. Onnie M. Lumintang, SH., M.Hum
 Dr. Nur Aedah, M.Si
 Dr. Yosephina Ohoiwutun, M.Si
 Dr. Beatus Tambaip, MA
 Dr. Muhammad Musaad, M.Si
 Dr. Lily Bauw, SH., M.Hum
 Dr. Vince Tebay, S.Sos., M.Si
 Dr. Rosye H. R. Tanjung, M.Sc., Ph.D
 Dr. Untung Turua, M.Si
 Dr. Untung Muhdiarta, M.Si
 Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si
 Dr. Renida Jozelina Torobi, S.Sos., M.Si
 Dr. Basir Rohrohmana, SH., M.Hum
 Dr. Agustina Ivonne Poli, M.Si
 Dr. Hiskia Charles Matheus Sapioper, M.Si
 Dr. Suriani Br. Surbakti, M.Si
 Dr. Rafael Kapura, S.IP., M.Si
 Dr. Melyana Ratana Pugu, S.IP., M.Si



Skema Pembiayaan Pendidikan

Biaya pendidikan mencakup 2 komponen utama dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UNCEN, sebagai berikut :

Komponen	Biaya(RP)	Vol	Waktu
Formulir Dan Pendaftaran	1.200.000	1 kali	Saat pendaftaran
Matrikulasi	2.500.000	1 kali	Semester Awal
SPI	1.500.000	1 kali	Semester Awal
SPP Tunggal	11.000.000	4 kali	Per- Semester



Contact Person :

Wulan :
082197597126

Sudarningsih :
081344258828

Apa Itu Magister Kebijakan Publik (MKP) ?

6. Program Studi Kebijakan Publik (MKP) adalah Program yang mengembangkan Ilmu di bidang Kebijakan Publik Sehingga mencetak lulusan berciri akademis yang dapat menguasai berbagai berbagai matra ilmu Kebijakan Publik secara konseptual dan teoritis.

Konsentrasi yaitu;

- ❖ **Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah;**
- ❖ **Kependudukan, Ketenagakerjaan, dan Gender;**
- ❖ **Tata Kelola Pemilu.**

Satuan Kredit Semester

Satuan Kredit Semester yang harus diselesaikan sebanyak 42 SKS, meliputi : 10 mata kuliah wajib program (22 SKS), 5 Mata Kuliah Khusus konsentrasi (14 SKS), dan Tesis (6 SKS). Kurikulum yang didesain dengan titik berat pengembangan kompetensi kemampuan penelitian dan analisis yang tinggi dengan wawasan konseptual, teoritis, dan praktik penelitian.



Sistem Perkuliahan dan Masa

Perkuliahan dirancang dalam 2 Tahun (satu tahun 2 semester), terdiri dari 12 sampai 16 tatap muka di kelas. Tiap tatap muka 3 SKS berdurasi 3x45 menit. Dapat diselesaikan paling cepat 18 bulan, rincian : Pendalaman teori 3-smt (1,5 tahun), serta penelitian, pembimbingan dan ujian Tesis 6 bulan. Diterapkan pula pola *workshop internship* dalam rangka penugasan mandiri dan terstruktur.

Perkuliahan diselenggarakan di Kampus Abepura, bila diikuti minimal 15 mahasiswa.

Kelas Intensif: Jam 16.00 – 21.00 setiap hari kerja.



PROGRAM PASCASARJANA



Program Studi

MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK

AKREDITASI "B"

Nomor SK :
4379/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2019

Berlaku Hingga :
05 November 2024